

SERI SEJARAH

MUSEUM DAN MONUMEN PANCASILA SAKTI

M. FAHLEVI, SH.MM.

(Penanggung Jawab)



Lokasi : Jl. Raya Pondok Gede
Jakarta Timur
Telp. 021-8411381

Penerbit GRASENA
email : Grasena@sejarahTNI.MIL.ID



(Bouscoulmé 1900)

MUSEUM DAN MONUMEN PANCASILA SAKTI



Penerbit GRASENA

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini
ke dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.
(All Rights Reserved)

Judul
**MUSEUM DAN MONUMEN
PANCASILA SAKTI**

Penulis :
M. Fahlevi, SH.MM.

Cetakan Pertama April 2004
ISBN .

Penerbit:
GRASENA
Jl. Gatot Subroto No.14
Jakarta Selatan
Telp.: 021-5256835

Percetakan : CV. GRAYUNA

email: Grasena@sejarahTNI.MIL.ID

KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi keinginan banyak pengunjung museum, kami mengusahakan buku yang merupakan koleksi foto diorama dan penjelasan museum dan monumen Pancasila Sakti. Penjelasan tersebut diangkat dari deskripsi diorama yang diorama tersebut merupakan penggambaran ulang dari fakta-fakta sejarah.

Semoga berkenan dihati dan kritik serta saran sangat kami harapkan.

M. FAHLEVI, SH.MM.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Denah Monumen Pancasila Sakti	viii
Museum Pengkhianatan PKI (Komunis)	1
1. Peristiwa Tiga Daerah (4 Nopember 1945) .	3
2. Aksi Teror Gerombolan Ce'Mamat (9 Desember 1945)	4
3. Aksi Kekerasan Pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang (12 Desember 1945) ..	6
4. Pemberontakan PKI di Cirebon (12 Februari 1946)	7
5. Peristiwa Revolusi Sosial di Langkat (9 Maret 1946)	8
6. Pemogokan Buruh Sarbupri di Delanggu (23 Juni 1948)	10
7. Pengacauan Surakarta (19 Agustus 1948) .	11
8. Pemberontakan PKI di Madiun (18 September 1948)	13
9. Pembunuhan di Kawedanan Ngawen, Blora (20 September 1948)	14
10. Pembebasan Gorang-Gareng (28 September 1948)	16
11. Penghancuran PKI di Sooko, Ponorogo (28 September 1948)	17
12. Pembantaian di Dungus (1 Oktober 1948) .	19

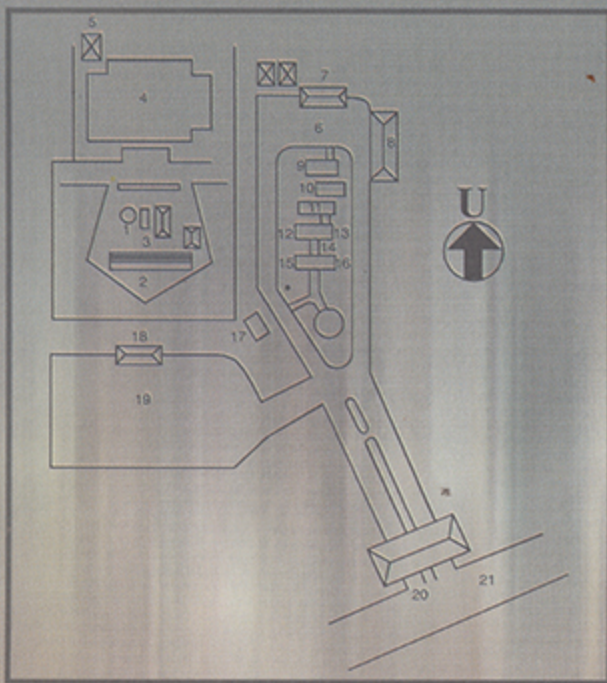
13. Musso Tertembak Mati (31 Oktober 1948) .	20
14. Pembunuhan Massal di Tirtomoyo, Wonogiri (4 Oktober 1948)	22
15. Penangkapan Amir Sjarifuddin (29 Nopember 1948)	23
16. Serangan gerombolan PKI ke Asrama Polisi di Tanjung Priok (6 Agustus 1951)	25
17. Peristiwa Tanjung Morawa (16 Maret 1953)	26
18. Lahirnya MKTBP PKI (14 Maret 1954)	28
19. D.N. Aidit Diadili (25 Februari 1955)	29
20. Kampanye Budaya PKI (25 Maret 1963)	31
21. Rongrongan PKI terhadap ABRI (1964-1965)	32
22. Peristiwa Kanigoro (13 Januari 1965)	34
23. Peristiwa Bandar Betsi (14 Mei 1965)	36
24. Pawai Ofensif Revolusioner PKI di Jakarta (23 Mei 1965)	37
25. Penyerbuan Gubernur Jawa Timur (27 September 1965)	39
26. Penguasaan Kembali Gedung RRI Pusat (1 Oktober 1965)	40
27. Peristiwa Kentungan, Yogyakarta (2 Oktober 1965)	42
28. Rapat Umum Front Pancasila (9 Nopember 1965)	43
29. Penangkapan D.N. Aidit (22 Nopember 1965)	45
30. Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) (14 Februari 1966)	46

31. Rakyat Jakarta Menyambut Pembubaran PKI (12 Maret 1966)	48
32. Operasi Trisula di Blitar Selatan (20 Juli 1968)	49
33. Penumpasan Gerakan PKI Illegal Iramani di Purwodadi (27 Januari 1973)	51
34. Tertembak matinya S.A. Sofyan (12 Januari 1974)	52
Pancasila Sakti	55
1. Paseban	57
2. Rapat-rapat Persiapan Pemberontakan (29 September 1965)	58
3. Latihan Sukarelawan PKI di Lubang Buaya (5 Juli-30 September 1965)	59
4. Penculikan Men/Pangad Letjen TNI Ahmad Yani (1 Oktober 1965)	60
5. Penganiayaan di Lubang Buaya (1 Oktober 1965)	62
6. Pengamanan Lanuma Halim Perdanakusuma (2 Oktober 1965)	63
7. Pengangkatan Jenazah Tujuh Pahlawan Revolusi (4 Oktober 1965)	64
8. Proses Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (11 Maret 1966)	66
9. Pelantikan Jenderal Soeharto Sebagai Pejabat Presiden RI (12 Maret 1967)	68
10. Tindak Lanjut Pelarangan PKI (26 Juni 1982)	69
11. Foto Para Pahlawan Revolusi	72
12. Ruang Relik	73

13. Ruang Teater	74
14. Ruang Pameran Foto	75
15. Sumur Maut Lubang Buaya	76
16. Rumah-Rumah Bersejarah	78
17. Rumah Penyiksaan	78
18. Rumah Pos Komando	80
19. Dapur Umum	81
20. Mobil Dinas Men/Pangad Letjen TNI Ahmad Yani	82
21. Mobil Dinas Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto	85
22. Truk Dodge	86
23. Panser Saraceen	87
24. Tugu, Patung dan Relief	89

--- o0o ---

DENAH MUSEUM/MONUMEN PANCASILA SAKTI

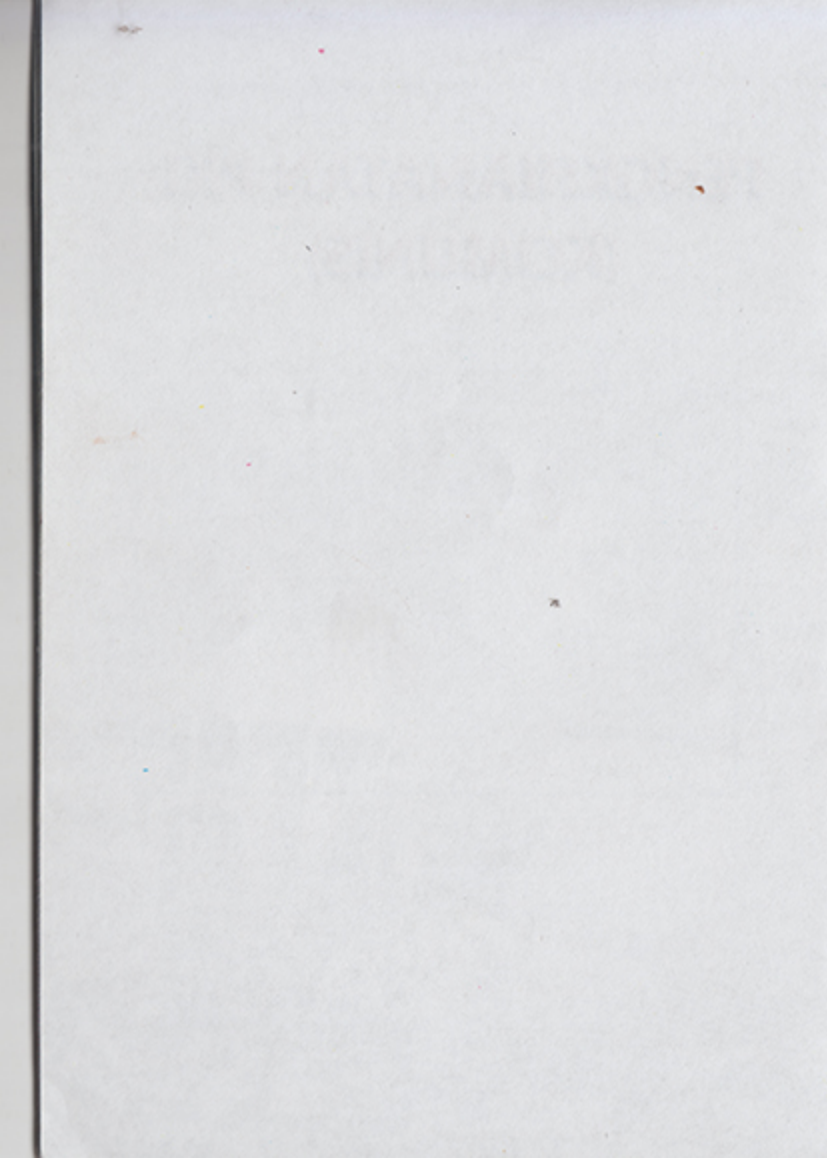


KETERANGAN:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cungkup Sumur Tua | 11. Museum |
| 2. Tugu Monumen Pancasila Sakti | 12. Ruang Relik |
| 3. Rumah-rumah eks G.30.S/PKI | 13. Ruang Teater |
| 4. Lapangan upacara Septa Marga | 14. Wc Umum |
| 5. Wc Umum | 15. Ruang Pameran Foto |
| 6. Lapangan parkir atas | 16. Ruang Perpustakaan/kantor |
| 7. Gedung Pendopo | 17. Kantin |
| 8. Museum Pengkhianatan PKI | 18. Kantin dan Mushola |
| 9. Aula gedung Paseban | 19. Lapangan parkir bawah |
| 10. Ruang VIP dan kantor | 20. Gapura Monumen Pancasila Sakti |
| | 21. Jl. Raya Pondok Gede |

PENGKHIANATAN PKI (KOMUNIS)





*Organisasi Massa PKI, API dan AMRI
menyerbu ke Markas TKR di Tegal
(4 Nopember 1945).*



PERISTIWA TIGA DAERAH

(4 NOVEMBER 1945)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, kelompok komunis bawah tanah mulai muncul. Mereka memasuki organisasi-organisasi massa dan pemuda seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI).

Dengan menggunakan organisasi-organisasi massa pemuda, orang-orang Komunis memimpin aksi penggantian para pejabat pemerintah di Kabupaten, Karesidenan Pekalongan yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang. Usaha untuk meredam gerakan mereka dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Tegal tetapi gagal.

Pada tanggal 8 Oktober 1945 AMRI Slawi di bawah pimpinan Sakirman tokoh komunis bawah tanah, dan AMRI Talang dipimpin oleh Kutil melakukan teror. Mereka menangkap pejabat pemerintah dan melakukan pembunuhan yang mengerikan di jembatan Talang. Pada tanggal 4 Nopember 1945 pasukan AMRI dan massa yang mereka pengaruhi melancarkan penyerbuan ke kota Tegal.

Mereka menyerang kabupaten dan markas TKR, namun berhasil digagalkan. Setelah gerakannya di Tegal gagal, tokoh-tokoh komunis membentuk Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah yang dipimpin oleh K. Mijaya, dan melakukan perebutan kekuasaan di Karesidenan Pekalongan.

AKSI TEROR GEROMBOLAN CE' MAMAT

(9 DESEMBER 1945)

Ce' Mamat, tokoh komunis 1926 yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Serang menuduh Pemerintah RI di Banten sebagai kelanjutan Pemerintah Kolonial. Rakyat dihasut untuk tidak mempercayai pejabat pemerintah.

Pada tanggal 17 Oktober 1945 ia membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang dan merebut pemerintahan Karesidenan Banten. Selanjutnya ia menyusun pemerintahan model Soviet.

*Gerombolan PKI Ce'Mamat membuang
jenazah Bupati Lebak R. Hardiwinangun
ke Sungai Cimancah, Jawa Barat
(9 Desember 1945).*



Untuk memperkuat kekuasaannya, Ce' Mamat dan para pengikutnya antara lain Laskar Gulkut melakukan berbagai teror, merampok harta benda rakyat, menculik dan membunuh pejabat pemerintah. Bupati Lebak R. Hardiwinangun termasuk salah seorang pejabat pemerintah yang menjadi korban. Kesempatan untuk membunuh bupati ini terbuka ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta berkunjung ke daerah Banten. Dengan dalih dipanggil Presiden, Ce' Mamat dan anak buahnya menjemput R. Hardiwinangun dari rumahnya di Rangkasbitung. Ternyata ia dibawa ke desa Panggarangan bukan ke Serang. Pagi hari tanggal 9 Desember 1945, mereka membunuh R. Hardiwinangun dengan tembakan di jembatan Sungai Cimancah dan membuang mayatnya ke sungai.

Pasukan Ubel-Ubel melakukan penjarahan barang-barang milik penduduk di desa Sepatan, Tangerang (12 Desember 1945).



AKSI KEKERASAN PASUKAN UBEL-UBEL DI SEPATAN, TANGERANG (12 DESEMBER 1945)

Pada tanggal 18 Oktober 1945 Badan Direktorium Dewan Pusat di bawah pimpinan Ahmad Khairun dengan didampingi oleh tokoh-tokoh komunis bawah tanah berhasil mengambil alih kekuasaan Pemerintah RI di Tangerang dari Bupati Agus Padmanegara. Aparatur pemerintahan dari tingkat Kabupaten sampai desa dan KNI Daerah dibubarkan. Bahkan mereka tidak mengakui Pemerintah Pusat RI di Jakarta. Sebagai kekuatan pendukung, Dewan membentuk Laskar Hitam atau Laskar Ubel-Ubel karena berpakaian serba hitam dan memakai ikat kepala (ubel-ubel). Laskar ini digunakan pula oleh Dewan untuk melakukan aksi teror seperti pembunuhan

dan perampokan harta benda penduduk Tangerang dan sekitarnya antara lain di Sepatan, Mauk Kronjo dan Kresek. Pada tanggal 12 Desember 1945 Laskar Hitam di bawah pimpinan Usman, melakukan perampokan harta benda penduduk desa Sepatan, dan pembunuhan di pelbagai tempat. Di Mauk mereka membunuh seorang tokoh nasional Oto Iskandar Dinata.

PEMBERONTAKAN PKI DI CIREBON

(12 FEBRUARI 1946)

Dengan dalih memeriahkan konferensi Laskar Merah pada Januari 1946 tetapi sekaligus untuk unjuk kekuatan, pimpinan PKI Mr. Joesoeph dan Mr. Soeprpto mendatangkan ± 3.000 anggota Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Cirebon. Pada tanggal 12 Februari 1946, Laskar Merah melucuti TRI, menguasai kota dan gedung-gedung vital seperti stasiun radio dan pelabuhan. Hotel Ribbrinck dijadikan markas komando gerakan untuk merebut kekuasaan pemerintah daerah.

Untuk mencegah pertumpahan darah, pimpinan Divisi II/Sunan Gunung Jati mencoba menyelesaikan peristiwa ini secara musyawarah dengan pimpinan PKI dan meminta agar senjata TRI dikembalikan. Oleh karena pihak PKI menolak permintaan itu,



*Pasukan Tentara Rakyat Indonesia (TRI)
sedang menyerang Hotel Ribbrinck di Cirebon
yang dijadikan markas bagi anggota PKI Laskar Merah
(12 Pebruari 1946)*

maka pada tanggal 14 Februari 1946,
TRI melancarkan serangan untuk merebut dan
menguasai kembali kota Cirebon.

Pos-pos penjagaan mereka berhasil dilumpuhkan
dan Markas Besar PKI di Hotel Ribbrinck diduduki.
Sebagian pasukan PKI menyerah,
sedangkan Mr. Joesoeph dan Mr. Soeprapto
berhasil ditangkap.

Kedua tokoh PKI tersebut diajukan ke
Pengadilan Militer untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya.

PERISTIWA REVOLUSI SOSIAL DI LANGKAT

[9 MARET 1946]

Lahirnya Republik Indonesia belum sepenuh-
nya diterima oleh kerajaan-kerajaan yang

masih ada di Sumatera Timur. Akibatnya timbul rasa tidak puas pada sebagian rakyat dan menuntut agar sistem kerajaan dihapus.

Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok komunis (PKI dan Pesindo) untuk menghapus pemerintahan dengan cara kekerasan.

Pada tanggal 3 Maret 1946, apa yang disebut revolusi sosial dimulai.

Revolusi itu bukan gerakan massa secara spontanitas tetapi gerakan yang sudah direncanakan. Revolusi tidak hanya ditujukan untuk menghapus pemerintah kerajaan tetapi juga membunuh raja-raja dan keluarganya serta merampas harta benda kerajaan.

Pada hari pertama aksi teror dan pembunuhan terjadi di Sunggal, Tanjung Balai, Rantau Prapat dan Pematang Siantar. Walaupun pada tanggal 5 Maret 1946 kerajaan Langkat secara resmi

Gerombolan PKI Usman Parinduri dan Marwan menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura (9 Maret 1946).



dibubarkan dan ditempatkan di bawah pemerintahan RI di Sumatera Timur, namun Sultan Langkat dan keluarganya tidak luput dari tindak kekerasan. Pada malam hari tanggal 9 Maret 1946 massa PKI di bawah pimpinan tokoh PKI Usman Parinduri dan Marwan, menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura. Malam itu juga istana di duduki oleh massa PKI. Sultan dan keluarganya ditawan dan dibawa ke Batang Sarangan. Beberapa orang anggota keluarga Sultan dibunuh.

PEMOGOKAN BURUH SARBUPRI DI DELANGGU (23 JUNI 1948)

Salah satu usaha PKI untuk menjatuhkan wibawa pemerintah RI, adalah mengacaukan perekonomian melalui aksi pemogokan buruh.

Pada tanggal 23 Juni 1948, lebih kurang 15.000 buruh pabrik goni dan 7 perusahaan perkebunan milik pemerintah di Delanggu, Klaten melancarkan aksi mogok total. Mereka adalah anggota Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri), organisasi buruh di bawah naungan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), organisasi massa PKI. Mereka mengajukan tuntutan kenaikan upah.

Hal ini sulit untuk diterima oleh pemerintah sebab negara sedang mengalami

Anggota-anggota buruh Sarbupri melakukan pemogokan di depan pabrik Goni di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah (23 Juni 1948).



kesulitan ekonomi yang parah.

Dalam masa mogok itu, salah seorang pimpinan SOBSI Maruto Darusman berpidato bahwa SOBSI menyetujui aksi itu bahkan, menghasut kaum buruh untuk melanjutkan pemogokan sampai tuntutan mereka berhasil.

Aksi mogok yang sangat merugikan negara itu berakhir pada tanggal 18 Juli 1948 setelah partai-partai politik pada tanggal 14 Juli 1948 mengeluarkan pernyataan menyetujui Program Nasional.

PENGACAUAN SURAKARTA

(19 AGUSTUS 1948)

Untuk mengalihkan perhatian Pemerintah RI terhadap kegiatan pemberontakan di Madiun,

*Gerombolan PKI melakukan pengacauan
di sebuah pasar malam
di Taman Sriwedari, Surakarta
(19 Agustus 1948)*



PKI dengan sengaja menciptakan suasana kacau
di kota Yogyakarta pusat pemerintahan RI.

Terbunuhnya Kolonel Sutarto,
Panglima Divisi IV/Panembahan Senopati,
oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal
2 Juli 1948 semakin memanaskan situasi.
Dengan menyebarkan isu bahwa Kolonel Sutarto
dibunuh oleh anggota Siliwangi,
PKI berhasil menghasut Pasukan Siliwangi.
Akibatnya terjadi penculikan, pembunuhan
dan bentrokan bersenjata.
Selain itu PKI juga berusaha menciptakan
suasana tidak aman dan tidak tenteram
di kalangan masyarakat.

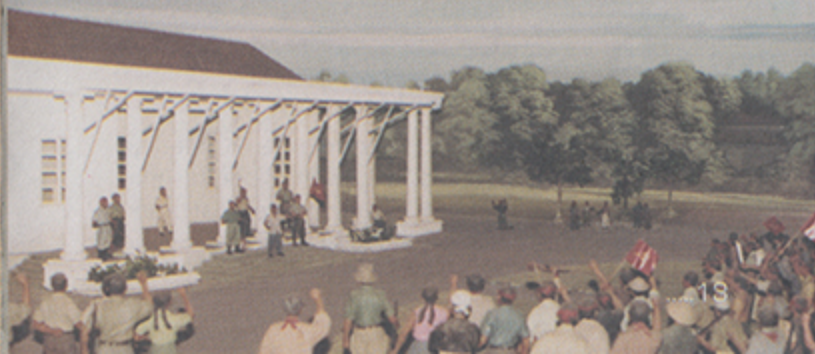
Malam hari tanggal 19 Agustus 1948,
ketika berlangsung Pasar Malam Sriwe
dari dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI,
PKI membakar ruang pameran

Jawatan Pertambangan, namun api dapat dicegah, sehingga tidak merembet ke tempat lain. Akibat kebakaran itu timbul suasana panik di kalangan pengunjung dan jatuh korban 22 orang menderita luka-luka.

PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN (18 SEPTEMBER 1948)

Setelah gagal menjatuhkan Kabinet Hatta melalui cara parlementer, maka organisasi-organisasi yang berhaluan komunis menghimpun diri dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR melakukan aksi-aksi politik dan tindak kekerasan. Aksi itu makin meningkat ketika Musso yang baru kembali dari Moskow mengambil alih pimpinan PKI. Musso menuduh Soekarno-Hatta menyelewengkan perjuangan bangsa Indonesia.

Massa PKI sedang mengumumkan berdirinya "Soviet Republik Indonesia" dan pembentukan pemerintahan Front Nasional, di depan gedung Karesidenan Madiun (18 September 1948).



Sebaliknya ia mengajukan thesis yang berjudul : Jalan baru untuk Republik Indonesia.

Pada saat pemerintah dan Angkatan Perang memusatkan perhatian untuk menghadapi Belanda, Partai Komunis Indonesia melakukan pengkhianatan. Didahului dengan kampanye-kampanye menyerang politik pemerintah, aksi-aksi teror, mengadu domba kekuatan bersenjata, dan sabotase di bidang ekonomi. Dini hari tanggal 18 September 1948 ditandai dengan 3 (tiga) kali letusan pistol, PKI mengadakan pemberontakan di Madiun. Pasukan seragam hitam segera bergerak menguasai obyek-obyek vital di dalam kota. Sejumlah tokoh militer, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat dibunuh. Beberapa gedung penting termasuk gedung Karesidenan Madiun di duduki. Di gedung inilah PKI mengumumkan : berdirinya "Soviet Republik Indonesia" dan pembentukan Pemerintah Front Nasional.

PEMBUNUHAN DI KAWEDANAN NGAWEN, BLORA

(20 SEPTEMBER 1948)

Pada tanggal 18 September 1948, Markas Kepolisian Distrik Ngawen (Blora) diserbu oleh pasukan PKI. Dua puluh empat orang anggota Polisi ditahan dan tujuh orang yang



Tujuh anggota polisi dari Markas Kepolisian Distrik Ngawen (Blora) sedang disiksa oleh massa PKI di Kawedanan Ngawen, Blora (20 September 1948).

masih muda dipisahkan. Mereka ditelanjangi kemudian disekap di sebuah ruang sempit di belakang kawedanan. Selama disekap tanpa busana itu, mereka diberi makan sekali. Kemudian datang perintah dari komandan pasukan PKI Blora, agar mereka dihukum mati.

Pada tanggal 20 September 1948, tujuh anggota Polisi itu dikeluarkan dari tahanan, dibawa ke suatu tempat terbuka dekat kakus di belakang kawedanan. Dengan pengawalan ketat mereka disuruh duduk di tanah. Dua orang pasukan PKI membawa dua batang bambu yang sudah diikat ujungnya. Acara penghukuman dimulai. Secara bergantian tahanan dipanggil, dan disuruh berdiri. Dua batang bambu yang dipegangi ujungnya oleh dua orang dijepitkan

ke lehernya. Pasukan PKI bersorak-sorak, ketika tawanan mengerang-erang kesakitan. Para tawanan lainnya disuruh menonton. Setelah seorang tahanan mati, jenazahnya diangkat beramai-ramai, dilempar ke dalam lubang kakus. Untuk meyakinkan bahwa tawannya telah mati, tembakan salvo diarahkan ke dalam lubang kakus.

PEMBEBASAN GORANG-GARENG (28 SEPTEMBER 1948)

Pada waktu PKI melakukan pemberontakan di Madiun, mereka menculik lawan-lawan politiknya seperti alim ulama, tokoh masyarakat, pamong praja dan polisi. Tindakan ini dilakukan tidak hanya di Madiun tetapi juga dilakukan di daerah-daerah lain, termasuk Gorang-Gareng, sebelah barat daya Madiun.

Di tempat ini terdapat pabrik gula Rejosari, yang menjadi markas pasukan komunis.

Di pabrik gula ini PKI mengumpulkan sejumlah tawannya. Pemerintah dan rakyat setempat tidak berdaya untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang pihak komunis.

Pada tanggal 28 September 1948, Batalyon Sambas yang sedang bergerak untuk membebaskan kota Madiun tiba di Gorang-Gareng. Mereka berhasil mematahkan perlawanan pasukan PKI yang mencoba menghadang



Batalyon Sambas sedang mengamankan pabrik gula Rejosari di daerah Gorang-Gareng, sebelah Barat Daya Madiun yang dijadikan markas pasukan komunis (28 September 1948).

gerak maju pasukan TNI.

Dalam usaha mengamankan daerah itu dari cengkeraman komunis, TNI membebaskan para tawanan yang belum sempat dibunuh dan merawat yang luka-luka. Di Gorang-Gareng ini pasukan Sambas menemukan puluhan orang yang sudah dibunuh oleh PKI, termasuk yang dibunuh di pabrik gula Rejosari.

PENGHANCURAN PKI DI SOOKO, PONOROGO

(28 SEPTEMBER 1948)

Setelah gagal merebut kota Trenggalek, Batalyon Maladi Yusuf, membuat kubu pertahanan di desa Sooko, di kaki gunung Wilis, Ponorogo. Di sini terdapat pula pasukan

Batalyon Sunandar dan batalyon Mujayin melakukan penyerbuan terhadap kubu pertahanan pasukan PKI Batalyon Maladi Yusuf di desa Sooko, di kaki gunung Wilis, Ponorogo (28 September 1948).



PKI lainnya di bawah pimpinan Soebardi, dan pasukan Panjang Djokopriyono sehingga pertahanan pasukan PKI bertambah kuat. Lawan-lawan politiknya, antara lain Asisten Wedana (Camat) Sooko sudah lebih dahulu dibersihkan.

Pada tanggal 28 September 1948, Kompi Sumadi dari Batalyon Sunandar dan Kompi Sabirin Muchtar dari Batalyon Mujayin melakukan serbuan terhadap kubu pertahanan pasukan PKI tersebut dari dua arah. Kompi Sumadi yang menyerbu dari arah selatan berhasil merebut Thuk Puyangan, sebuah bukit yang tidak jauh dari markas komando pasukan PKI. Maladi Yusuf tertembak di pahanya. Kompi Sabirin Muchtar menyerbu dari arah utara. Karena terkepung, Maladi Yusuf mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk membendung serbuan TNI.

Usaha itu tidak berhasil.

Pasukan PKI terdesak dan tidak mampu lagi bertahan di desa Sooko. Pertempuran yang mulai berkobar sejak pukul 10.00 pagi baru berakhir pada senja hari setelah pasukan Maladi Yusuf dipukul mundur dengan meninggalkan banyak korban dan senjata antara lain 5 pucuk SMB 12,7.

PEMBANTAIAN DI DUNGUS

(1 OKTOBER 1948)

Dengan perkiraan bahwa Madiun tidak mungkin dipertahankan, maka sebelum pasukan TNI memasuki kota ini pada tanggal 30 September 1948, tokoh-tokoh PKI dan pasukannya mengundurkan diri ke desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kawedanan Dungus, sebelah tenggara kota Madiun.

Rupanya daerah ini sudah dipersiapkan sebagai basis pengunduran serta pertahanan PKI. Dalam pengunduran ini, pasukan PKI membawa banyak tawanan yang belum sempat dibunuh.

Sebelum mereka sempat mengadakan konsolidasi, siang hari tanggal 1 Oktober 1948, Kresek diserang oleh kompi Sampurno yang bergerak dari arah Sawahan, lereng timur G. Wilis.

Pada hari itu juga TNI berhasil menguasai Dungus. Dalam keadaan terdesak, sebelum melarikan diri orang-orang PKI membantai hampir semua tawannya



Massa PKI melakukan pembantaian terhadap lawanannya di halaman sebuah rumah milik penduduk di desa Krasak Kecamatan Wungu, Kawedanan Dungus, Madiun (1 Oktober 1948).

dengan cara ditembak atau dipenggal lehernya. Pembantaian dilakukan di sebuah rumah milik salah seorang penduduk dan beberapa tempat di sekitar rumah itu. Mayat para korban dikubur dalam lubang besar yang dangkal atau dibuang ke sungai. Diantara para korban terdapat beberapa perwira TNI, dan perwira polisi, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

MUSSO TERTEMBAK MATI (31 OKTOBER 1948)

Pada tanggal 1 Oktober 1948 TNI berhasil menguasai Dungus yang dijadikan PKI sebagai daerah pengunduran setelah kekalahan mereka di Madiun. Para pimpinan PKI dan pasukannya melarikan diri ke arah selatan serta berusaha menguasai Ponorogo.

Serangan mereka ke kota ini, pada tanggal 8 Oktober 1948, gagal. Pimpinan PKI terpecah menjadi beberapa rombongan yang masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Musso dan Amir Sjarifuddin dikawal oleh dua batalyon yang cukup kuat melarikan diri menuju gunung Gambes.

Di tengah perjalanan, mereka berpisah. Dengan dua orang pengawalnya dan menyamar sebagai penduduk desa, pagi hari tanggal 31 Oktober 1948 Musso tiba di Balong. Di tempat ini ia menembak mati seorang anggota Polisi yang memeriksanya. Dengan dokar rampasan dan diiringi pengawal yang bersepeda, hari itu juga ia tiba di desa Semanding, Kecamatan Somoroto. Seorang perwira TNI yang mencegatnya di tembaknya, tetapi tidak mengenai sasaran. Ia berhasil merampas kendaraan TNI, namun tidak dapat menjalankannya.

Pimpinan PKI di Madiun, Musso, tertembak mati ketika ia mencoba melarikan diri dan bersembunyi di sebuah tempat mandi milik seorang penduduk di desa Semanding, Kecamatan Somoroto, Ponorogo, Jawa Timur (31 Oktober 1948).



Sesudah itu ia melarikan diri masuk desa dan bersembunyi di sebuah blandong (tempat mandi) milik seorang penduduk. Pasukan TNI yang mengepungnya memerintahkan supaya ia menyerah. Musso menolak, bahkan melawan sehingga terjadi tembak menembak. Dalam peristiwa itu ia tertembak mati.

PEMBUNUHAN MASSAL DI TIRTOMOYO, WONOGIRI (4 OKTOBER 1948)

Sekalipun Madiun jatuh ke tangan TNI, tentara PKI masih melanjutkan kekejaman terhadap lawan-lawan politiknya. Di daerah Wonogiri mereka men teror rakyat dan menculik pejabat pamong praja antara lain bupati, wedana, anggota polisi dan para ulama. Para tawanan yang berjumlah 212 orang ditahan dan disekap di dalam bekas laboratorium dan gudang dinamit yang terletak di Bukit Tirtomoyo. Secara bertahap sejak tanggal 4 Oktober 1948 sebagian tawanan dibunuh setelah lebih dahulu disiksa. Ada yang langsung disembelih dengan bambu runcing dan bayonet atau lehernya dijerat dengan kawat. Bahkan ada yang dilempari dengan batu sampai mati dalam keadaan tangan terikat. Pembunuhan yang sudah menelan korban 56 orang terhenti karena pasukan PKI disergap oleh Batalyon Nasuhi dan Kompi S Militaire



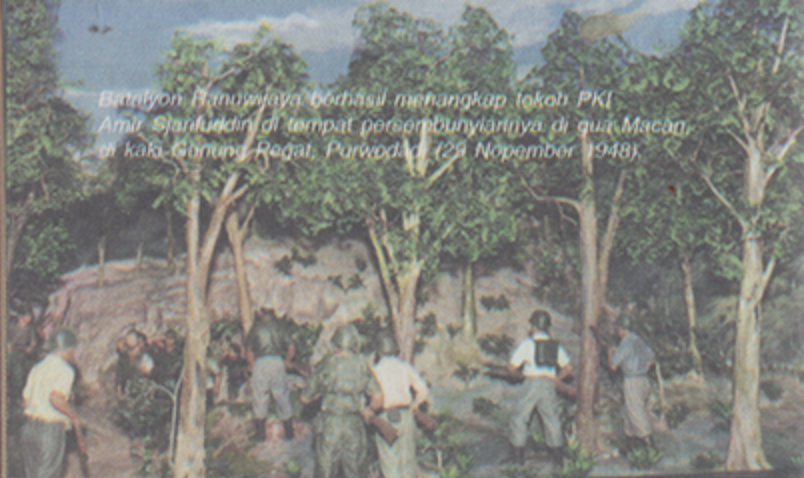
Suasana Bukit Tirtomoyo, Wonorejo, ketika perombolan PKI sedang melakukan pembunuhan massal terhadap tawannya antara lain Bupati, wedana, anggota polisi dan para ulama (4 Oktober 1948).

Academie (MA) pada sore hari tanggal 14 Oktober 1948. Sergapan tersebut didahului oleh tiga orang kadet MA yang berhasil melumpuhkan penjaga tahanan. Hal ini membuat Tentara PKI terkejut dan panik sehingga mereka melarikan diri.

PENANGKAPAN AMIR SJARIFUDDIN (29 NOPEMBER 1948)

U saha PKI untuk mengadakan konsolidasi di daerah Gunung Liman yang sudah dipersiapkan sebagai pusat pertahanan setelah kekalahan mereka di Madiun, berhasil digagalkan TNI. Serangan mereka ke Ponorogo juga gagal. Pimpinan pemberontakan terpecah menjadi beberapa rombongan yang masing-masing

Batalyon Hanuwijaya berhasil menangkap tokoh PKI Amir Sjarifuddin di tempat persembunyiannya di gua Macan, di kaki Gunung Pegat, Purwodadi (29 Nopember 1948).



berusaha menyelamatkan diri. Amir Sjarifuddin dan Musso dikawal oleh dua batalyon yang cukup kuat, melarikan diri ke arah Gunung Gambes di sebelah barat Madiun.

Di tengah perjalanan mereka berpisah.

Setelah melalui perjalanan panjang dan sulit, Amir Sjarifuddin akhirnya tiba di daerah Purwodadi. Ia dan rombongannya bersembunyi di gua Macan di Gunung Pegat, Kecamatan Klambu.

Pada mulanya ia merasa aman karena polisi keamanan yang menjaga garis demarkasi Demak-Dempet-Gendong, tidak jauh dari tempat persembunyiannya, adalah orang-orang komunis.

Setelah TNI melucuti Polisi Keamanan ini dan meluncurkan operasi-operasi pembersihan di sekitar daerah Klambu, posisi Amir Sjarifuddin terjepit.

Pada tanggal 22 Nopember 1948 pasukan pengawalnya menyerah. Senin sore tanggal

29 Nopember 1948 tempat persembunyiannya dikepung oleh TNI. Amir Sjarifuddin dan beberapa tokoh PKI lainnya menyerah dan diserahkan kepada komandan Brigade-12 di Kudus.

SERANGAN GEROMBOLAN PKI KE ASRAMA POLISI DI TANJUNG PRIOK

(6 AGUSTUS 1951)

Sesudah Pengakuan Kedaulatan, sisa-sisa kekuatan bersenjata PKI membentuk gerombolan-gerombolan bersenjata seperti gerombolan Sunari di Jawa Timur, Merapi-Merbabu Kompleks di Jawa Tengah. Di Jakarta dan sekitarnya beroperasi gerombolan Eteh. Untuk menimbulkan rasa tidak percaya rakyat terhadap pemerintah, mereka menteror rakyat

Gerombolan PKI Eteh sedang menganiaya dua anggota polisi di pos jaga asrama polisi di Tanjung Priok. Mereka menyerang asrama tersebut dengan tujuan untuk merampas senjata (6 Agustus 1951).



dengan cara perampokan, pembakaran dan pembunuhan, bahkan berani melawan pejabat tinggi negara dan aparat keamanan.

Pada tanggal 6 Agustus 1951 pukul 19.00 WIB, gerombolan Eteh berkekuatan puluhan orang bersenjata tajam dan bersenjata api serta memakai ikat kepala bersimbol burung merpati dan palu arit menyerang asrama Mobile Brigade Polisi di Tanjung Priok dengan tujuan merebut senjata.

Peristiwa ini diawali ketika seorang anggota gerombolan dengan alasan menjenguk rekannya tiba-tiba menyerang anggota Polisi di pos jaga asrama. Dua orang anggota Polisi yang sedang bertugas jaga sama sekali tidak menduga datangnya serangan yang tiba-tiba itu sehingga mereka tidak sempat melakukan perlawanan. Kedua anggota polisi itu mengalami luka-luka parah. Seorang wanita penghuni asrama juga menderita luka-luka. Dalam serangan ini, gerombolan berhasil merampas 1 bren, 7 karaben mauser dan 2 pistol.

PERISTIWA TANJUNG MORAWA

(16 MARET 1953)

Pada tahun 1953 Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas areal perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa.

Polisi melepaskan tembakan peringatan ke atas, tetapi massa PKI dan BTI tidak menghiraukan mereka, bahkan mereka berusaha merebut senjata polisi (16 Maret 1953).



Akan tetapi areal perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar. Di antara mereka terdapat beberapa imigran gelap Cina. Usaha pemerintah untuk memindahkan para penggarap dengan memberi ganti rugi dan menyediakan lahan pertanian, dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa PKI. Oleh karena cara musyawarah gagal, maka pada tanggal 16 Maret 1953 pemerintah terpaksa mengerahkan areal tersebut dengan dikawal oleh sepasukan polisi. Untuk menggagalkan usaha pentraktor, BTI mengerahkan massa yang sudah mereka pengaruhi dari berbagai tempat di sekitar Tanjung Morawa.

Mereka bertindak brutal. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke atas, tetapi tidak dihiraukan, bahkan mereka berusaha merebut senjata polisi. Dalam suasana kacau, jatuh korban meninggal dan luka-luka.

PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit menyelenggarakan Kongres Nasional ke V. Dalam Kongres ini mereka merumuskan sebuah metode yang diberi nama Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) (14 Maret 1954).



LAHIRNYA MKTBP PKI

(14 MARET 1954)

Kekuatan bersenjata PKI berhasil dihancurkan ketika mereka melancarkan pemberontakan di Madiun tahun 1948. Akan tetapi sebagai partai, PKI tidak dibubarkan oleh pemerintah.

Di bawah pimpinan tokoh-tokoh muda seperti D.N. Aidit, sejak tahun 1950 PKI bangkit kembali dan berusaha menanamkan pengaruhnya di berbagai kalangan. Untuk mencapai kekuasaan politik, PKI menyusun metode perjuangan yang diberi nama Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Metode ini dirumuskan dalam Kongres Nasional V PKI pada tanggal 14 Maret 1954, yang antara lain berisi : pertama perjuangan gerilya di desa yang terdiri dari kaum buruh dan tani miskin, kedua perjuangan

revolusioner kaum buruh di kota terutama buruh angkutan, dan ketiga bekerja intensif di kalangan musuh terutama di kalangan Angkatan Bersenjata (ABRI).

MKTBP merupakan metode perjuangan yang tertutup. Untuk mencapai sasaran tersebut, PKI menyusupkan kader-kadernya ke dalam ABRI dengan tujuan menanamkan paham Komunis. Khusus mengenai pelaksanaan metode ketiga MKTBP, hanya dilakukan oleh kader-kader PKI yang benar-benar terpilih dan sangat terbatas. Biro khusus PKI adalah badan pelaksana dari metode ketiga untuk menggagalkan unsur pimpinan dan anggota ABRI supaya bersikap netral, simpati dan memihak PKI.

D.N. AIDIT DIADILI

(25 FEBRUARI 1955)

PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit sejak tahun 1952 meningkatkan agitasi dan propagandanya di segala bidang.

Antara lain dengan mengeluarkan Statemen Polit Biro CC PKI pada tanggal 13 September 1953, yang berjudul "Peringati Peristiwa Madiun secara Intern"! Dalam statemen yang dimuat dalam surat kabar PKI, Harian Rakyat tanggal 14 September 1953, PKI secara terang-terangan dan sengaja menghina Pemerintah RI dengan menyatakan bahwa Pemberontakan Madiun

Sekretaris Jenderal Polit Biro CC PKI, D.N. Aidit dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jakarta untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya (25 Februari 1955).



tahun 1948 bukan dilakukan oleh PKI tetapi akibat provokasi pemerintah Hatta. Statemen tersebut pada hakekatnya adalah agitasi dan propaganda PKI untuk membersihkan dirinya dari aksi pemberontakan yang dilakukan di Madiun tahun 1948 dalam rangka mencari dukungan massa.

Untuk mempertanggungjawabkan statemen tersebut, Sekretaris Jenderal Polit Biro CC PKI D.N. Aidit dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang peradilan berlangsung selama 4 bulan, dimulai tanggal 25 November 1954 dan berakhir tanggal 25 Februari 1955. Dalam keputusan Pengadilan tanggal 31 Maret 1955, D.N. Aidit dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

KAMPANYE BUDAYA PKI

[25 MARET 1963]

Tidak hanya bidang politik yang ingin dikuasai PKI, tetapi juga bidang lain, termasuk bidang sastra dan budaya. Usaha ini dilaksanakan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) bersama lembaga-lembaga yang ada di bawahnya seperti Lembaga Sastra Film dan Lembaga Drama. Secara sistematis mereka memasukkan komunisme ke dalam seni dan sastra, mempolitikkan budayawan dengan semboyan "Politik adalah Panglima" serta mendiskreditkan para sastrawan dan budayawan non komunis. Usaha itu dilakukan melalui media-massa PKI dan berbagai pertemuan. Salah satu diantaranya ialah melalui Konferensi Nasional I Lembaga Sastra Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 22-25 Maret 1963.

Untuk menunjukkan kekuatan politik, setelah mengadakan Konferensi Nasional I Lembaga Sastra Indonesia, massa PKI dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) mengadakan pawai alegoris berkeliling kota Medan (25 Maret 1963).



Konferensi tidak hanya membahas masalah budaya yang harus bernaifaskan komunisme, tetapi juga membahas masalah politik, yakni menuntut agar segera dibentuk kabinet gotong royong yang memungkinkan tokoh-tokoh PKI duduk di dalamnya.

Di bidang sastra dikeluarkan tuntutan agar buku-buku terbitan Balai Pustaka benar-benar seirama dengan Manifesto,

Konferensi sangat mendukung setiap kegiatan olah raga dan pertemuan bernafas internasional yang berkiblat kepada negara-negara komunis.

Konferensi tersebut merupakan bagian dari kampanye budaya PKI.

Untuk menunjukkan kekuatannya, sehabis konferensi mereka mengadakan pawai alegoris berkeliling kota Medan.

RONGRONGAN PKI TERHADAP ABRI [1964-1965]

Kampanye mendiskreditkan ABRI sudah dilakukan PKI sejak masa Perang Kemerdekaan (1945-1949). Tujuannya adalah untuk memecah belah kekompakan ABRI, memandulkan peranan sosial-politik ABRI, menghapuskan jati diri ABRI sebagai pejuang-prajurit dan prajurit pejuang, yang pada akhirnya menguasai ABRI.

Massa PKI dari Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) mengadakan Kongres di Gedung Serikat Buruh Kereta Api, Manggarai, Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1964. Pada Kongres ini mereka melancarkan isu Dewan Jenderal. (1964-1965).



Secara terbuka kampanye anti ABRI, khususnya TNI-AD, berlatar belakang pada kecemburuan PKI karena ABRI berhasil membendung pengaruh PKI di kalangan rakyat. Berbagai macam cara kampanye anti ABRI telah dilakukan oleh PKI seperti tuduhan, isu, provokasi, fitnah politik yang dilemparkan ke tengah-tengah masyarakat oleh badan propaganda dan media massa PKI.

Sejak tahun 1964, aksi kampanye ini makin meningkat sebagai "ofensif revolusionernya". Tindak kekerasan aksi sepihak, tuntutan pembubaran aparat tertitorial, isu Nasakomisasi ABRI, isu Angkatan V dokumen palsu Gilchrist adalah wujud aksinya. Sebagai puncak kampanyenya adalah isu Dewan Jenderal

pada tahun 1965, yang bermuara pada Pemberontakan G.30 S/PKI. Salah satu aksi kampanye dari bawah, antara lain disampaikan pada Kongres Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) suatu organisasi massa PKI, pada tanggal 3 Agustus 1964 di Gedung Serikat Buruh Kereta Api Manggarai, Jakarta.

PERISTIWA KANIGORO (13 JANUARI 1965)

Walaupun PKI berhasil mengintimidasi partai-partai politik dan organisasi massa Islam, tetapi mereka gagal sama sekali melumpuhkan kekuatan pengikut partai-partai dan organisasi massa tersebut.

Organisasi partai politik dan organisasi massa Islam melakukan pula usaha untuk membendung intimidasi dan penyusupan pengaruh komunisme ke dalam organisasi mereka dengan cara memperkuat keislaman dan ketaqwaan para anggotanya. Usaha seperti itu dilakukan antara lain oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Timur di desa Kanigoro, Kecamatan Kediri. Mereka ini menyelenggarakan mental training pada bulan Januari 1965.

Ketika pelatihan itu sedang berlangsung, subuh tanggal 13 Januari 1965 kompleks pesantren tempat pelatihan diadakan,

Massa PKI menyerang para Pelajar Islam Indonesia (Pii) yang sedang mengadakan pelatihan mental di sebuah pesantren di desa Kanigoro, Jawa Timur, pada tanggal 13 Januari 1965.



diserang oleh massa Pemuda Rakyat (PR) dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Massa komunis ini tidak hanya menyiksa para peserta latihan, tetapi juga menginjak-injak kitab suci Al-Qur'an sambil mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina agama Islam. Beberapa peserta pelatihan, pria dan wanita, dan tokoh-tokoh agama setempat mereka tangkap. Berkat campur tangan Camat Keras, para korban penangkapan dibebaskan hari itu juga, tetapi pelaksanaan mental training terpaksa dibatalkan.

*Massa PKI di Perkebunan Karet Bandar Betsi,
Pematang Siantar melakukan pengeroyokan terhadap
Pelda Sujono hingga tewas, pada tanggal 14 Mei 1965.*



PERISTIWA BANDAR BETSI (14 MEI 1965)

Untuk menggagalkan rencana pemerintah di bidang land reform, PKI dan organisasi-massanya melancarkan aksi sepihak, yakni menguasai secara tidak sah tanah negara di beberapa tempat. Salah satu di antaranya di Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Karet-IX Bandar Betsi, Pematang Siantar.

Pada tanggal 14 Mei 1965, 200 anggota Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat (PR), dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menanamkan secara liar tanah milik perkebunan penanaman karet. Pembantu Letnan Dua (Pelda) Sujono, seorang prajurit TNI-AD yang dikaryakan di PPN Karet IV bersama tiga temannya sedang bertugas mengeluarkan traktor yang terperosok sehari sebelumnya di dekat tanah tersebut.

Ia memperingatkan massa supaya menghentikan penanaman liar itu. Peringatan tidak dihiraukan, bahkan mereka memperlihatkan sikap menantang. Pelda Sujono dikeroyok dan dipukuli dengan berbagai benda, termasuk benda tajam, sehingga prajurit itu jatuh terlentang di tanah. Seketika itu juga kepalanya dicangkul oleh seorang anggota BTI. Akibat penganiayaan tersebut, Pelda Sujono tewas di tempat itu.

PAWAI OFENSIF REVOLUSIONER PKI DI JAKARTA (23 MEI 1965)

Setelah merasa dirinya kuat, PKI mulai melancarkan ofensif revolusioner yang bertujuan untuk menggalang dan mempengaruhi massa agar berpihak kepadanya. Untuk kekuatan ofensif revolusioner ini diwujudkan dalam aksi-aksi kekerasan seperti sabotase, aksi sepihak, aksi teror, tuntutan pembentukan Kabinet Nasakom dan Angkatan Kelima, agitasi dan propaganda mengenai hal-hal yang dianggap menghalangi programnya. Dengan dalih melaksanakan Manipol Usdek, PKI berusaha membubarkan organisasi-organisasi lawannya seperti Manifes Kebudayaan. Patung tokoh-tokoh komunis internasional dan tokoh-tokoh PKI dipamerkan di jalan-jalan raya

*Puncak peringatan hari ulang tahun PKI ke 45
di Stadion Utama, Jakarta, pada tanggal 23 Mei 1965.*



secara terbuka. Unjuk kekuatan kepada masyarakat ini dilansir besar-besaran melalui media massa dan berbagai macam pertemuan. Kepada masyarakat didengungkan bahwa kekuatan PKI adalah nomor satu di dunia luar, kubu Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina.

Unjuk kekuatan besar-besaran di laksanakan serentak di seluruh Indonesia pada peringatan hari ulang tahun PKI ke-45 tanggal 23 Mei 1965.

Puncak peringatan itu diselenggarakan di Jakarta dalam bentuk "Rapat Raksasa" di Stadion Utama, di mana hadir sejumlah utusan komunis internasional.

Pada saat itu D.N. Aidit Ketua CC PKI mengomandokan kepada massa PKI untuk meningkatkan "ofensif revolusioner" sampai puncaknya".

PENYERBUAN GUBERNURAN JAWA TIMUR

(27 SEPTEMBER 1965)

Usaha untuk menunjukkan kekuatannya tidak hanya dilakukan dengan cara mengintimidasi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa lawannya, tetapi juga dengan cara mendiskreditkan aparat pemerintah. Salah seorang diantaranya ialah Gubernur Jawa Timur. Dengan dalih untuk menyampaikan resolusi yang berisi tuntutan penurunan harga sembilan bahan pokok, pada tanggal 27 September 1965 delegasi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang mengatasnamakan Gabungan Organisasi Wanita Surabaya, mendatangi kantor Gubernur. Sebelum delegasi itu tiba, Komite Daerah Besar (CDB) PKI Jawa Timur telah mengerahkan

Ribuan massa PKI melakukan penyerbuan ke Kantor Gubernur Jawa Timur, pada tanggal 27 September 1965.



ribuan massa PKI ke Gubernuran. Mereka adalah para anggota Pemuda Rakyat (PR), Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), dan organisasi massa PKI lainnya. Di Gubernuran mereka merusak berbagai peralatan kantor dan berusaha menangkap gubernur. Mereka dapat bertindak leluasa sebab pada hari itu sebagian besar anggota ABRI yang berada di Surabaya sedang meng-adakan latihan di luar kota.

Keadaan dapat dikuasai oleh ABRI setelah didatangkan satu kompi pasukan bantuan dan dua kendaraan lapis baja. Massa PKI berhasil dibubarkan dan usaha mereka untuk menangkap gubernur gagal.

PENGUASAAN KEMBALI GEDUNG RRI PUSAT

[1 OKTOBER 1965]

Dini hari tanggal 1 Oktober 1965 Gerakan Tiga Puluh September (G.30.S/PKI) menculik dan membunuh 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat yang dinilai sebagai penghalang utama rencana mereka untuk merebut kekuasaan negara. Pagi itu pula mereka berhasil menguasai gedung RRI Pusat dan gedung Pusat Telekomunikasi. Di bawah todongan pistol, seorang penyiar RRI dipaksa menyiarkan pengumuman yang menyatakan bahwa G.30.S/PKI telah menyelamatkan negara dari usaha kudeta "Dewan Jenderal".



Satu kompi RPKAD melakukan operasi militer untuk membebaskan Gedung RRI dan Gedung Pusat Telekomunikasi dari penguasaan G.30.S/PKI di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1965.

Tengah hari mereka mengumumkan pembentukan Dewan Revolusioner sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan pendemisioneran kabinet. Untuk menghentikan pengumuman-pengumuman yang menyesatkan rakyat itu, Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen Soeharto mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat dan memerintahkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) untuk membebaskan Gedung RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi dari penguasaan G.30.S/PKI. Operasi yang dimulai pukul 18.30, dengan mengerahkan kekuatan satu kompi dalam waktu hanya 20 menit, RPKAD berhasil menguasai kembali kedua gedung vital itu. Pukul 20.00 tanggal 1 Oktober 1965 RRI Pusat sudah dapat menyiarkan pidato radio Mayjen Soeharto yang menjelaskan adanya usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI melalui G.30.S/PKI.

*Kolonel Katamso disiksa dan dibunuh oleh
beberapa oknum TNI-AD pendukung G.30 S/PKI
di asrama Batalyon L, Kentungan, Yogyakarta
(2 Oktober 1965)*

PERISTIWA KENTUNGAN YOGYAKARTA

(2 OKTOBER 1965)

Pada tanggal 1 Oktober 1965 di Yogyakarta, G.30.S/PKI berhasil menguasai RRI, Markas Korem 072 dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Pada sore harinya, mereka menculik Komandan Korem 072 Kolonel Katamso, dan Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Sugiyono secara terpisah. Selanjutnya kedua perwira ini dibawa ke kompleks Asrama Batalyon L, Kentungan, kira-kira 6 km di sebelah utara Yogyakarta. Pada dini hari tanggal 2 Oktober 1965 secara bergantian keduanya dibunuh.

Yang pertama menjadi korban ialah Letnan Kolonel Sugiyono. Ia digiring ke pinggir lobang sedalam satu meter yang sudah dipersiapkan, dan para pembunuh sudah menunggu.

Seorang anggota G.30.S/PKI memukul tengkuk perwira itu dengan kunci mortir. Pada pukulan kedua ia terjatuh dan kemudian meninggal dunia. Selanjutnya Kolonel Katamso, mengalami peristiwa yang sama bahkan lehernya dijerat dengan seutas kawat.

Mayat korban pembunuhan tersebut di masukkan ke dalam satu lubang yang telah dipersiapkan. Untuk menghilangkan jejak, di bekas lubang itu dan sekitarnya ditanami pohon singkong. Kedua jenazah baru ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1965 dalam keadaan rusak, setelah dilakukan pencarian yang intensif.

RAPAT UMUM FRONT PANCASILA (9 NOPEMBER 1965)

Tidak adanya tindakan tegas dari Presiden Soekarno terhadap PKI yang mendalangi G.30.S/PKI menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat. Berbagai golongan masyarakat menuntut supaya PKI dan semua organisasi massanya dibubarkan. Golongan-golongan ini bergabung dalam Komando Aksi Pengganyangan Kontra Revolusi (G.30.S/PKI) yang pada tanggal 23 Oktober 1965 berganti nama menjadi Front Pancasila. Kehadiran Front Pancasila mengilhami lahirnya kesatuan-kesatuan aksi seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),

Setelah rapat umum seorang anggota Front Pancasila membacakan resolusi pembubaran PKI kepada wakil pemerintah yang hadir di lapangan Banteng, Jakarta (9 Nopember 1965).



Kesatuan Aksi Pemuda Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI).

Bersama dengan Front Pancasila, kesatuan-kesatuan aksi ini melakukan demonstrasi menuntut agar PKI dan semua organisasi massanya dibubarkan. Tuntutan mereka dipertegas dalam resolusi Front Pancasila pada saat diadakan Rapat Raksasa Pengganyangan Kontra Revolusi pada tanggal 9 Nopember 1965 di lapangan Banteng, Jakarta. Resolusi yang berisi antara lain pembubaran PKI, tokoh-tokoh PKI diajukan ke pengadilan disampaikan kepada wakil pemerintah yang hadir di tempat itu.

PENANGKAPAN D.N. AIDIT

[22 NOPEMBER 1965]

Setelah G.30.S/PKI mengalami kegagalan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1965 tengah malam Ketua CC PKI D.N.Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah yang merupakan basis utama PKI. Tanggal 2 Oktober 1965 ia berada di Yogyakarta, kemudian berpindah-pindah tempat dari Yogyakarta ke Semarang.

Selanjutnya ia ke Solo untuk menghindari operasi pengejaran yang dilakukan oleh RPKAD. Tempat persembunyiannya yang terakhir di sebuah rumah di kampung Sambeng Gede. Daerah ini merupakan basis Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), organisasi massa yang bernaung di bawah PKI.

Melalui operasi intelijen, tempat persembunyian D.N. Aidit dapat diketahui oleh ABRI.

Ketua CC PKI D.N. Aidit berhasil ditangkap anggota Komando Pelaksana Kuasa Perang Surakarta dari tempat persembunyiannya di sebuah rumah di kampung Sambeng Gede, Solo (22 Nopember 1965).



Tengah malam tanggal 22 Nopember 1965 pukul 01.30 rumah tersebut digrebek dan digeledah oleh anggota Komando Pelaksanaan Kuasa Perang (Pekuper) Surakarta. Penangkapan hampir gagal ketika pemilik rumah menyatakan D.N. Aidit telah meninggalkan rumahnya.

Kecurigaan timbul setelah anggota Pekuper menemukan sandal yang masih baru, koper dan radio yang menandakan hadirnya seseorang lain di dalam rumah itu. Penggeledahan dilanjutkan. Dua orang Pekuper menemukan D.N. Aidit yang bersembunyi di balik lemari.

Ia langsung ditangkap dan kemudian dibawa ke Markas Pekuper Surakarta di Loji Gandrung, Solo.

SIDANG MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA (MAHMIUB)

(14 FEBRUARI 1966)

Untuk menumpas G.30 S/PKI, pemerintah meluncurkan operasi militer dan operasi yustisi. Sebagai realisasi yustisi, pemerintah mengaktifkan kembali lembaga Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara khususnya tokoh-tokoh utama penggerak G.30.S/PKI.

Sidang pertama Mahmilub berlangsung pada tanggal 14 Februari 1966, bertempat di



*Nyono, penggerak G.30.S/PKI
sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya
di hadapan Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa,
Jakarta (14 Februari 1966).*

gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta.

Sidang ini memeriksa dan mengadili perkara subversif Nyono bin Sastrorejo, seorang anggota Polit Biro CC PKI merangkap Sekretaris I Komite Daerah Besar (CDB) Jakarta Raya. Ia dituduh turut merencanakan dan memimpin pemberontakan melawan pemerintah yang sah dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis.

Sidang Mahmilub berhasil membuktikan keterlibatan Nyono sebagai perencana dan penggerak G.30.S/PKI.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pada tanggal 21 Februari 1966 Mahmilub menjatuhkan vonis mati terhadap Nyono.



Masyarakat Jakarta bersama-sama ABRI mengadakan parade kemenangan menyambut pembubaran dan pelarangan PKI (12 Maret 1966).

RAKYAT JAKARTA MENYAMBUT PEMBUBARAN PKI (12 MARET 1966)

Pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Soeharto menerima Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar dari Presiden Soekarno.

Surat Perintah itu berisi wewenang untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketertiban.

Untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat, berdasarkan Surat Perintah itu pada tanggal 12 Maret 1966 Letjen Soeharto atas nama Presiden Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi mengeluarkan

Keputusan tentang pembubaran PKI dan organisasi-organisasi massanya yang seazas, bernaung dan berlandung di bawah PKI.

Partai Komunis Indonesia juga dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Keputusan ini diambil setelah melihat kenyataan bahwa PKI baik secara faktual maupun yuridis telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah melalui Gerakan 30 September/PKI.

Keputusan pembubaran dan pelarangan PKI diumumkan melalui RRI pada pukul 06.00 tanggal 12 Maret 1966. Keputusan itu mendapat sambutan hangat dari seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Jakarta mengadakan pawai kemenangan di jalan-jalan dan membawa poster-poster sebagai ungkapan rasa gembira dan terima kasih.

OPERASI TRISULA DI BLITAR SELATAN

(20 JULI 1968)

Setelah PKI dibubarkan, sisa-sisa pimpinan PKI berusaha membangun kembali partai dengan cara membentuk basis-basis gerilya yang disebut Komite Proyek (Compro).

Melalui Compro Blitar Selatan, PKI membentuk Central Komite (CC) dan Komite Daerah Besar (CDB) Jawa Timur. Sebagai persiapan gerilya, mereka menyusun kekuatan bersenjata,



Kodam VIII/Brawijaya sedang melancarkan Operasi Trisula terhadap sisa-sisa anggota PKI yang bersembunyi di sebuah gua di desa Sumberjati, Kecamatan Lodojo, Blitar Selatan (20 Juli 1968).

mengintensifkan latihan kemiliteran dan membangun kubu pertahanan yang berupa ruangan bawah tanah (Ruba) dengan memanfaatkan gua-gua alam sebagai tempat persembunyian dan kubu pertahanan.

Di samping itu mereka melakukan kegiatan agitasi dan propaganda untuk mempengaruhi rakyat secara illegal.

Dengan diketahuinya kegiatan mereka, Kodam VIII/Brawijaya segera membentuk Komando Satuan Tugas Trisula yang diperkuat oleh kesatuan TNI-AU, Polri dan Hansip/Wanra serta aparaturnya yang terkait dengan tugas melaksanakan operasi militer untuk menumpas gerakan tersebut.

Pada tanggal 20 Juli 1968 salah satu bagian dari Satuan Tugas Trisula ini dengan dibantu

oleh Hansip/wanra melancarkan operasi pembersihan di desa Sumberjati, Kecamatan Lodoyo, Blitar Selatan. Sasaran operasi ialah gua alam yang terdapat di desa tersebut. Dalam operasi ini berhasil ditangkap 11 orang PKI yang bersembunyi di dalam gua. Salah seorang diantaranya ialah Rewang, anggota CC PKI gaya baru.

PENUMPASAN GERAKAN PKI ILLEGAL IRAMANI DI PURWODADI

(27 JANUARI 1973)

Samsudin alias Iramani, seorang kader PKI sejak tahun 1968 membina sejumlah mantan tahanan G.30.S/PKI dan membentuk Komite Pangkalan Mobil (CPM) dan Prajurit Gerilya (Praga). Untuk menjaga kerahasiaan, mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Aksi-aksi mereka adalah perampokan, pembunuhan dan intimidasi terhadap penduduk dan mantan tahanan G.30.S/ PKI. Gerakan yang dipimpin oleh Iramani ini bernama "Gerakan Pembangunan Kembali PKI", berhasil membina 7.000 orang.

Berkat operasi intel dan operasi teritorial yang dilaksanakan oleh ABRI bersama rakyat di Kabupaten Grobogan, Sragen dan Boyolali, berhasil mempersempit ruang gerak mereka.



ABRI bersama rakyat berhasil mengepung
gerombolan PKI Iramani di hutan Bubak,
Purwodadi (27 Januari 1973).

Oleh karena di daerah Purwodadi tidak mungkin bertahan, mereka bergerak pindah ke daerah Boyolali. Pada dini hari tanggal 27 Januari 1973, mereka keluar dari hutan Perahu menuju ke hutan Bubak, melintasi jalan raya Solo-Purwodadi. Di dusun Ngasem desa Monggot, sejumlah penduduk di bawah pimpinan Muspika Geyer dan Lurah Monggot menghadang mereka, setelah rahasia mereka bocor. Dalam penghadangan ini berhasil ditangkap 29 orang anggota gerombolan Iramani.

TERTEMBAK MATINYA S.A. SOFYAN (12 JANUARI 1974)

Di bawah pimpinan S.A. Sofyan, sisa-sisa PKI Kalimantan Barat berhasil mendirikan PKI gaya baru. Walaupun secara militer

kekuatan mereka tidak berarti namun secara politik tetap merupakan bahaya. S.A. Sofyan didukung oleh Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) yang berhaluan komunis. Untuk menghancurkannya, sejak Februari 1969 dilancarkan Operasi Sapu Bersih III. Operasi ini berhasil menghancurkan kekuatan para pendukung PKI gaya baru.

Operasi militer selanjutnya dengan dukungan rakyat berhasil menghancurkan pengikut S.A. Sofyan pada bulan Juni 1973. Setelah anggota keluarga dan beberapa pengikutnya tertangkap, S.A. Sofyan menyelamatkan diri bersembunyi di daerah rawa-rawa Tarentang, sebelah tenggara Pontianak. Pada tanggal 12 Januari 1974 pasukan RPKAD berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Ketika disergap, S.A. Sofyan tertembak mati.

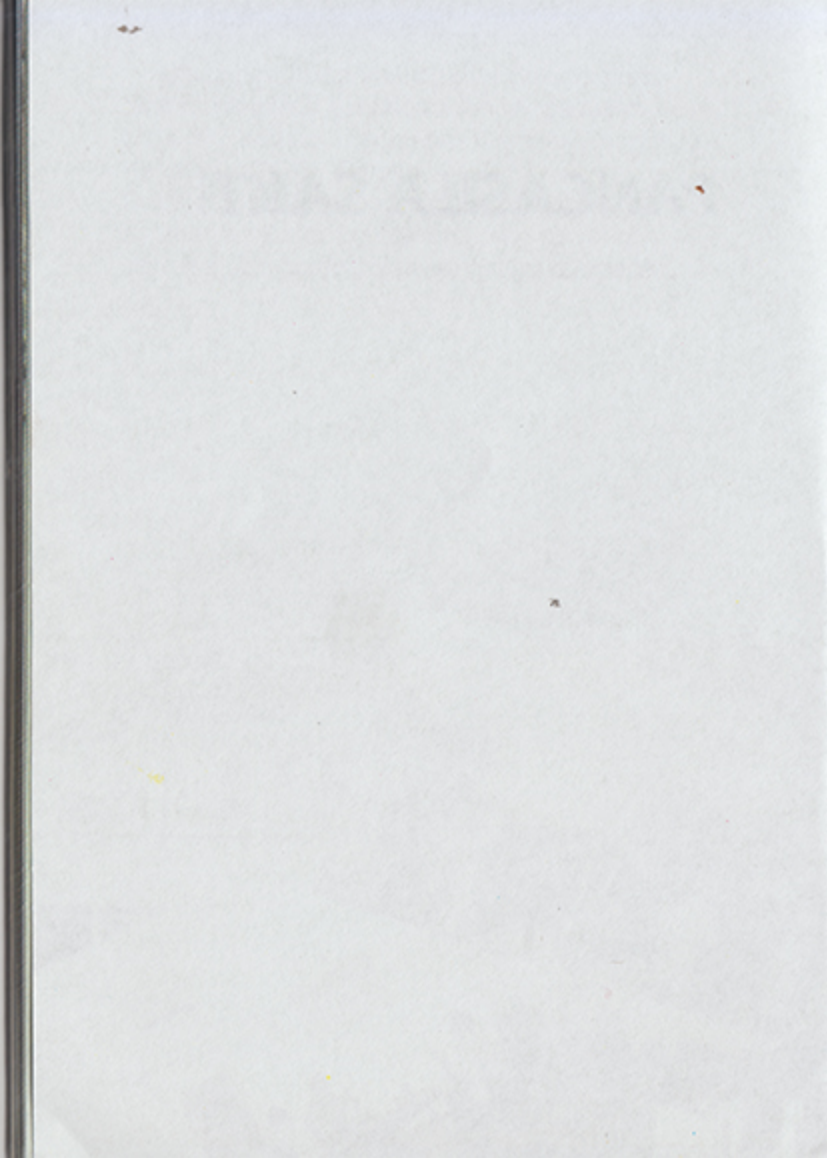
*Pasukan RPKAD sedang menyergap
tempat persembunyian S.A. Sofyan di Tarentang,
Pontianak (12 Januari 1974).*



Disamping itu operasi-operasi pembersihan, termasuk operasi gabungan dengan pasukan Malaysia, berhasil menumpas Gerakan Pengacau Keamanan PGRS-Paraku.

Sejak tanggal 20 Nopember 1982 daerah Kalimantan Barat dinyatakan aman dan bersih dari sisa-sisa gerombolan pengacau keamanan.

PANCASILA SAKTI



PASEBAN

Museum Monumen Pancasila Sakti yang terletak di gedung Paseban, diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 1 Oktober 1981 bertepatan dengan Dwi Windu Hari Peringatan Kesaktian Pancasila. Di dalam ruangan museum terdapat beberapa diorama, yang secara khusus menggambarkan pemberontakan PKI yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September/ PKI (G.30 S/PKI), dimulai dari persiapan dan pelaksanaannya. Setelah pemberontakan G.30 S/PKI yang gagal, proses tampilnya seorang pemimpin besar dalam pemerintah RI dan tindak lanjut Pemerintah terhadap pelarangan PKI tergambar pula di ruang ini.



Tiga anggota B.30 SIPKI sedang mengadakan rapat persiapan pemberontakan (29 September 1965).



RAPAT-RAPAT PERSIAPAN PEMBERONTAKAN

[29 SEPTEMBER 1965]

Pada bulan September 1965 Ketua CC PKI D.N. Aidit memerintahkan Syam Kamaruzaman, Pimpinan Biro Khusus untuk menyusun suatu rencana pemberontakan. Syam mengadakan rapat sebanyak 16 kali dengan Pono dan Waluyo, anggota Pimpinan Biro Khusus Pusat, Kepala Biro Khusus Daerah dan oknum-oknum ABRI yang sudah dibina PKI. Kesimpulan rapat tersebut adalah gerakan ini harus dibantu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dalam suatu rapat dengan oknum ABRI dibahas masalah pelaksanaan yang meliputi personil, logistik pembagian tugas, pembagian sektor dan sasaran gerakan serta konsep "Dewan Revolusi".

Rapat terakhir yang diadakan pada tanggal 29 September 1965, memutuskan gerakan diberi nama "Gerakan 30 September".

Hari H dan jam J adalah 1 Oktober 1965 dini hari. Sasaran pertama menculik para pejabat teras TNI-AD.

LATIHAN SUKARELAWAN PKI DI LUBANG BUAYA

(5 JULI-30 SEPTEMBER 1965)

Untuk persiapan pemberontakan, PKI mengadakan latihan kemiliteran bagi para anggotanya. Dalih yang digunakan ialah melatih para sukarelawan dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia.

PKI menuntut agar pemerintah membentuk Angkatan Kelima dengan mempersenjatai buruh dan tani.

*Anggota-anggota sukarelawan PKI
sedang dilatih di desa Lubang Buaya
(5 Juli-30 September 1965)*



Anggota-anggota yang dilatih di Lubang Buaya Jakarta Timur disebut Sukta (Sukarelawan Kita). Mereka terdiri dari pemuda dan pemudi PKI, buruh dan tani serta kelompok lain dalam partai Komunis. Latihan diadakan dari tanggal 5 Juli sampai 30 September 1965.

Mereka berjumlah 3700 anggota dan dibagi menjadi tujuh bagian. Selain di Lubang Buaya, latihan juga diadakan di Rawa Binong, ± 2 km dari Lubang Buaya, dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 29 September 1965.

Di tempat ini hanya 26 anggota yang dilatih untuk kader-kader khusus PKI.

Latihan ini dipimpin oleh beberapa anggota Angkatan Udara yang sudah dipengaruhi PKI.

PENCULIKAN MEN/PANGAD LETJEN TNI A. YANI

(1 OKTOBER 1965)

Pukul 02.30 tanggal 1 Oktober 1965 pasukan penculik dari G.30.S/PKI sudah berkumpul di Lubang Buaya. Pasukan dengan nama Pasopati dipimpin Lettu Dul Arief.

Pasukan penculik Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letjen TNI A. Yani memakai seragam Cakrabirawa tiba di sasaran pukul 04.00 dan berhasil melucuti regu pengawal.

Mereka memasuki rumah dan bertemu dengan seorang putera Jenderal A. Yani.

*Dua anggota pasukan Pasopati menembak
Letjen A. Yani di kediamannya, Jln. Lembang No.58 D,
Jakarta (1 Oktober 1965)*



Para penculik menyuruh anak tersebut untuk membangunkan ayahnya.

Jenderal A. Yani keluar dari kamar dengan berpakaian piyama. Salah seorang penculik mengatakan bahwa Bapak diminta segera menghadap Presiden. Beliau akan mandi dan berpakaian dulu. Salah seorang anggota penculik mengatakan tidak perlu mandi dan mencuci muka pun tidak boleh. Melihat sikap yang kurang ajar itu, Jenderal A. Yani marah dan menampar oknum tersebut. Beliau berbalik dan menutup pintu. Ketika itulah Pak Yani diberondong dengan senjata Thomson dan gugur seketika. Kemudian tubuh Jenderal A. Yani yang berlumuran darah diseret ke luar rumah dan dilemparkan ke atas truk, lalu dibawa ke Lubang Buaya.

Empat perwira TNI AD yang diculik gerombolan G.30.S/PKI dalam keadaan masih hidup sedang disiksa di desa Lubang Buaya (1 Oktober 1965).



PENGANIAYAAN DI LUBANG BUAYA [1 OKTOBER 1965]

Dini hari tanggal 1 Oktober 1965 gerombolan G.30.S/PKI menculik 6 orang pejabat teras TNI AD dan seorang perwira pertama. Mereka membawa para perwira itu ke desa Lubang Buaya dan menawan mereka di sebuah rumah yang bernama rumah penyiksaan.

Di rumah ini tubuh mereka dirusak dengan benda-benda tumpul dan senjata tajam, seperti senapan, pisau dan benda-benda lainnya sehingga tubuh mereka rusak.

Penyiksaan dan pembunuhan itu dilakukan oleh anggota Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan ormas-ormas PKI lainnya.

Sesudah disiksa para korban dilemparkan dalam sumur tua yang sempit.

Pertama jenazah Jenderal Pandjaitan, Jenderal A. Yani, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal Sutoyo, Jenderal Suprpto yang diikat bersama-sama dengan Jenderal S. Parman. Terakhir adalah jenazah Lettu P.A. Tendean. Penganiayaan tersebut berlangsung sampai pukul 06.30 pagi.

PENGAMANAN LANUMA HALIM PERDANAKUSUMA

(2 OKTOBER 1965)

Panglima Kostrad Mayjen TNI Soeharto mengeluarkan perintah untuk segera mengamankan lapangan udara Halim Perdanakusuma mengingat kekuatan G.30.S/PKI berpusat di pangkalan tersebut.

*Pasukan RPKAD sedang melakukan
pengamanan Lanuma Halim Perdanakusuma
(2 Oktober 1965).*



Pasukan yang akan melaksanakan tugas pengamanan terdiri atas 1 Yon RPKAD, 1 Yon Para Kujang Siliwangi yang diperkuat 1 kompi panser. Pasukan bergerak pukul 03.00 tanggal 2 Oktober 1965 dari Markas Kostrad menuju lapangan udara Halim Perdanakusuma dari arah timur. Mereka tiba di tempat sasaran pukul 06.00 pagi tanggal 2 Oktober 1965. Lapangan Halim Perdanakusuma dijaga oleh Yon 454/Diponegoro yang diperalat G.30.S/PKI.

Beberapa orang anggota RPKAD berhasil menyusup sampai ke tempat parkir pesawat-pesawat terbang, sedang anggota lainnya sudah berada di depan pasukan Yon 454. Dengan gerakan pendadakan, pasukan RPKAD dan Kujang berhasil melumpuhkan pasukan Yon 454. Pukul 06.10 Halim berhasil dikuasai oleh RPKAD dan Yon Para Kujang, dan gerakan selanjutnya ialah menguasai desa Lubang Buaya.

PENGANGKATAN JENAZAH TUJUH PAHLAWAN REVOLUSI [4 OKTOBER 1965]

Setelah menguasai Halim Perdanakusuma, pasukan RPKAD melanjutkan gerakannya ke Lubang Buaya. Setelah daerah itu diamankan, mulailah diadakan pencarian jenazah perwira-

Panglima Kostrad Mayjen TNI Soebarto sedang menyaksikan pengangkatan jenazah korban keganasan G.30.S/PKI yang dilakukan oleh pasukan TNI-KAD dan KIPAM (4 Oktober 1965)



perwira TNI AD yang diculik oleh gerombolan G.30.S/PKI.

Sore hari tanggal 3 Oktober 1965 diperoleh petunjuk dari seorang anggota POLRI yang pernah ditawan oleh gerombolan G.30.S/PKI.

Ia memberitahukan bahwa perwira-perwira tersebut sudah dibunuh dan jenazahnya dikubur di sekitar tempat pelatihan musuh.

Ternyata jenazah dimasukkan ke dalam sumur tua, lalu ditimbun dengan sampah kering daun-daun singkong secara berselang-seling.

Pengangkatan jenazah dilakukan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh anggota-anggota Kesatuan Intai Para Amfibi (KIPAM) dari Marinir (KKO-TNI-AL) dan anggota RPKAD.

Satu persatu jenazah dikeluarkan yang pertama nampak adalah jenazah Lettu P.A. Tendean, jenazah Jenderal Suprpto dan S. Parman yang

diikat jadi satu. Setelah itu jenazah Jenderal Sutoyo, Jenderal Harjono, Jenderal A. Yani dan terakhir jenazah Jenderal Pandjaitan.

Jenazah-jenazah tersebut berada dalam kondisi yang buruk sebagai akibat penganiayaan dan pembusukan di dalam sumur.

Pengangkatan jenazah tersebut disaksikan oleh Panglima Kostrad Mayor Jenderal TNI Soeharto.

Dalam pidato singkatnya beliau mengatakan bahwa jenazah-jenazah tersebut merupakan bukti nyata kekejaman PKI.

Pada tanggal 5 Oktober 1965 jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dan pangkatnya dinaikkan satu tingkat.

PROSES² LAHIRNYA SURAT PERINTAH 11 MARET 1966 (11 MARET 1966)

Pada tanggal 11 Maret 1966 Kabinet Dwikora bersidang di Istana Negara, ditengah memuncaknya demonstrasi mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari oknum-oknum G.30.S/PKI dan penurunan harga.

Presiden yang mendapat laporan bahwa istana dikepung oleh pasukan tidak dikenal, segera meninggalkan sidang dan berangkat ke Istana Bogor. Tiga orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Yusuf dan Brigjen Amir Machmud



menyusul ke Bogor setelah melapor kepada Men/Pangad Letjen Soeharto.

Mereka meyakinkan Presiden bahwa tidak benar ada pasukan tanpa identitas mengepung Istana dan menyampaikan pesan Letjen Soeharto yang sanggup mengatasi keadaan apabila Presiden memberinya kepercayaan untuk tugas itu.

Dari laporan itu lahirlah ide untuk memberikan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto.

Presiden Soekarno memerintahkan ketiga perwira tinggi itu menyusun konsep surat perintah.

Konsep itu kemudian dibaca oleh tiga orang Wakil Perdana Menteri yang juga berada di Istana Bogor.

Surat perintah yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau "Supersemar" berisi pemberian wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya

keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Malam itu juga SP 11 Maret disampaikan kepada Letjen Soeharto di Jakarta.

**PELANTIKAN JENDERAL SOEHARTO
SEBAGAI PEJABAT PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
(12 MARET 1967)

Para Panglima Angkatan Bersenjata menyadari situasi konflik yang berlarut-larut antara lembaga-lembaga perwakilan rakyat dengan Presiden Soekarno dapat menimbulkan perpecahan nasional. Mereka melakukan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno, untuk mencari jalan keluar bagi

Ketua Sidang Istimewa MPRS, Jenderal Nasution sedang melantik Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden di Istana Negara, Jakarta (12 Maret 1967)



pemecahan konflik tersebut sebelum berlangsungnya Sidang Istimewa MPRS. Setelah diadakan pertemuan beberapa kali, Presiden Soekarno memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan sehari-hari kepada Jenderal Soeharto. Pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI dengan resmi menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto. Sementara itu pimpinan partai-partai politik dan para senior ABRI meminta Jenderal Soeharto agar bersedia menerima kepemimpinan negara. Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 menghasilkan Ketetapan MPRS No.XXXIII/ MPRS/ 1967 tentang pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden. Hari itu juga Jenderal Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden RI.

TINDAK LANJUT PELARANGAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA

(26 JUNI 1982)

Pada tanggal 12 Maret 1966 Partai Komunis Indonesia termasuk bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah beserta semua organisasinya yang seazas/berlindung/

Menteri Pemuda dan Olah Raga memimpin Penataran Kewaspadaan Nasional yang diikuti oleh wakil pemuda dari 27 Provinsi dan dari berbagai organisasi massa pemuda (19 September 1991).



bernaung di bawahnya, dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Keputusan itu diperkuat oleh Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, bahkan ditambah larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Untuk mengantisipasi munculnya bahaya laten komunis, berdasarkan Instruksi Presiden No.10 tahun 1982, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) bekerja sama dengan Lembaga Pertahanan Nasional mengadakan Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas) bagi pejabat di Departemen-departemen dan instansi-instansi pemerintah. Oleh karena generasi muda perlu waspada terhadap bahaya laten tersebut,

maka Kantor Menteri Pemuda dan Olah Raga
diberi wewenang menyelenggarakan Tarpadnas.
Sejak tanggal 19 September 1991 Tarpadnas
diikuti oleh wakil-wakil pemuda dari 27 propinsi
dan dari berbagai organisasi massa pemuda.

FOTO PARA PAHLAWAN REVOLUSI

Tujuh foto Pahlawan Revolusi setengah badan dalam ukuran besar, dimulai dari sebelah kiri atas adalah foto Letjen TNI A. Yani, Mayjen TNI Suprpto, Mayjen TNI MT. Haryono, Mayjen TNI S. Parman dan dari sebelah kiri bawah adalah Brigjen TNI DI. Pandjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomihardjo dan Lettu Pierre Andries Tendean.



Tujuh foto Pahlawan Revolusi.

RUANG RELAX

Ruang Relik berisi barang-barang peninggalan para Pahlawan Revolusi terutama pakaian yang dikenakan pada saat mereka diculik dan dibunuh, petikan visum dokter, peluru

yang
ditemukan
dalam tubuhnya,
tali pengikat dari
lain-lain.
Di ruangan ini
disajikan pula
aqualung
(alat bantu
pernapasan) dan
sebuah radio
lapangan yang
pernah digunakan
Jenderal
Soeharto
pada waktu
memimpin
penumpasan
G.30.S/ PKI.



RUANG TEATER

Di ruang Teater pengunjung dapat menyaksikan film dokumenter. Film ini menggambarkan pengangkatan jenazah tujuh Pahlawan Revolusi, pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1965, penjelasan Agen Polisi II Sukitman tentang penyiksaan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya serta Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa dan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada tahun 1967.
Masa putar film ini ± 20 menit.



Ruang Teater.

RUANG PAMERAN FOTO

Ruangan ini menyajikan foto-foto pengangkatan jenazah dan pemakaman Pahlawan Revolusi di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta.



*Pameran foto Pengangkatan Jenazah
Tujuh Pahlawan Revolusi dan Pemakamannya.*

SUMUR MAUT LUBANG BUAYA

Partai Komunis Indonesia ingin merebut kekuasaan pemerintah Indonesia dengan menggunakan aksi kekerasan yaitu melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan satu perwira pertama yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965.

Setelah diculik, tujuh perwira tersebut dibawa ke desa Lubang Buaya di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur.

Dari ketujuh perwira

tersebut, empat diantaranya masih dalam keadaan hidup. Sesampainya

di Lubang Buaya, keempat perwira yang masih hidup disiksa beramai-ramai secara keji dan biadab oleh gerombolan G.30 S/PKI kemudian dibunuh satu persatu.



Tempat mengubur enam Jenderal dan seorang perwira pertama Angkatan Darat oleh G 30.S/PKI.



Gungup Sumur Tua.

Jenazah ketujuh perwira tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua dengan kedalaman 12 m dan berdiameter 75 cm dengan posisi kepala dibawah. Selanjutnya para gerombolan G.30 S/PKI, menutup sumur dengan timbunan batang-batang pisang, sampah secara berselang-seling beberapa kali dan terakhir sumur tersebut ditutup dengan tanah diatasnya. Sebagai tipuan mereka menggali lubang-lubang sehingga dapat menyesatkan bagi orang-orang yang akan mencari jenazah ketujuh perwira tersebut.

Dari sumur tua ditemukan tujuh jenazah yaitu Letnan Jenderal TNI Ahmad yani, Mayor Jenderal TNI S. Parman, Mayor Jenderal TNI M.T Haryono, Mayor Jenderal TNI Suprpto, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo, Brigadir Jenderal TNI D.I. Panjaitan, dan Letnan Satu Pierre Tendean.

Berkat kerja keras dari satuan-satuan ABRI, jenazah-jenazah tersebut dapat diangkat pada tanggal 4 Oktober 1965 dalam keadaan rusak akibat penganiayaan secara kejam di luar batas-batas kemanusiaan.

RUMAH-RUMAH BERSEJARAH

a. RUMAH PENYIKSAAN

Menjelang akhir Agustus 1965 pimpinan Biro Khusus PKI Syam Kamaruzaman terus menerus mengadakan pertemuan. Pertemuan pada tanggal 22 September 1965 diselenggarakan di rumah Syam di jalan Pramuka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tentang penetapan sasaran gerak bagi masing-masing pasukan. Pasukan yang akan bergerak menculik atau membunuh para Jenderal yang dianggap lawan politiknya diberi nama pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letnan Satu Dul Arief. Pasukan tersebut bergerak dari Lubang Buaya pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 yang didahului dengan gerakan penculikan. Mereka yang diculik adalah :





1. Letjen TNI Ahmad Yani
2. Mayjen TNI M.T. Harjono
3. Mayjen TNI Suprpto
4. Mayjen TNI S. Parman
5. Brigjen TNI D.I Panjaitan
6. Brigjen TNI Sutoyo
7. Lettu Pierre Tendean

Mereka yang masih hidup dimasukkan ke dalam rumah berukuran 8m X 15,5 m. Secara kejam mereka dianiaya dan dibunuh oleh anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani serta organisasi lain yang merupakan organisasi satelit PKI. Setelah puas dengan segala kekejamannya semua jenazah dimasukkan ke dalam sumur lalu ditimbun dengan sampah dan tanah.

Rumah yang digunakan untuk menyiksa para korban terbuat dari bilik dan papan.

Sebelum meletus Pemberontakan G. 30.S/PKI rumah itu digunakan sebagai tempat belajar Sekolah Rakyat (sekarang SD).

Di dalam rumah penyiksaan terdapat diorama yang menggambarkan penyiksaan para korban yang masih dalam keadaan hidup. Mereka adalah Mayor Jenderal TNI Suprpto, Mayor Jenderal TNI S. Parman, Brigjen TNI Sutoyo Siswomihardjo dan Lettu Czi Pierre Andries Tendean.

b. RUMAH POS KOMANDO

Rumah ini milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Pada waktu meletusnya Gerakan 30 September PKI tahun 1965, digunakan oleh pimpinan gerakan yaitu eks Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap perwira TNI AD.



Pada tanggal 30 September 1965 pukul 24.00 WIB, di rumah pos komando pasukan Pasopati dibriefing mengenai pelaksanaan gerakan. Pasukan Pasopati bergerak menuju sasaran setelah selesai menerima pengarahan dari Dul Arief.

Sebagai bukti sejarah bagi generasi muda, rumah Haji Sueb diabadikan di Monumen Pancasila Sakti, untuk mengingat betapa kejamnya PKI terhadap para Pahlawan Revolusi. Di dalam rumah pos komando masih terdapat peninggalan barang-barang asli antara lain; 3 buah lampu petromaks, mesin jahit, dan lemari kaca.

c. DAPUR UMUM

Rumah dapur umum merupakan salah satu rumah bersejarah yang ada di lokasi Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.

Rumah tersebut dilestarikan sebagai koleksi benda bersejarah karena merupakan bagian dari sarana yang digunakan oleh PKI untuk menunjang terlaksananya kegiatan penganiayaan dan pembunuhan terhadap tujuh perwira TNI AD dalam peristiwa G.30.S/PKI.

Rumah yang statusnya milik ibu Amroh digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan G.30.S/PKI di Lubang Buaya.

Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya (sekarang lokasi Monumen Pancasila Sakti)



mereka mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap penduduk yang tinggal di lokasi Monumen. Untuk dapat mencapai tujuan, PKI memerintahkan para penduduk mengungsi untuk sementara, karena di sekitar mereka sedang ada latihan perang secara besar-besaran baik siang maupun malam.

Oleh karena itu kira-kira tiga hari sebelum peristiwa G.30.S/PKI meletus, Ibu Amroh yang sehari-harinya sebagai pedagang pakaian keliling (cingkau) meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan tanpa menerima uang saku sepeserpun. Mereka menuruti segala kemauan PKI karena dijanjikan atas keamanan rumah dan isinya. Walaupun akhirnya mereka tahu bahwa mereka dibohongi oleh PKI.

Setelah mengungsi beberapa hari ke tempat sanak famili, para penduduk kembali ke Lubang

Buaya atas saran dari para pamong desa tempat mengungsi. Alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat keadaan rumah berantakan tidak karuan. Sebagian perabot hilang, sebagian lagi tercecer di halaman dan kebun.

MOBIL DINAS MEN/PANGAD LETNAN JENDERAL TNI A. YANI

Letnan Jenderal Ahmad Yani selain sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) juga merangkap sebagai Kepala Staf Komando Tertinggi (KOTI) sejak bulan Pebruari 1965 sampai gugurnya beliau oleh gerombolan G.30.S/PKI.

Mobil dinas dengan nomor registrasi AD-01, yang digunakan oleh Men/Pangad Letjen TNI A. Yani, mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

- Mobil produksi : 64 - 3829
- Nomor rangka : LA - 12560
- Nomor mesin : M - 689126 E
- Mesin : V - 8 Cylinder cubic inch
(6490), 250 Hp dan
4 barrel carburator.
- Rocket Ultra Compression dengan sistem otomatis
(power) pada transmisi, jendela, stir dan rem.
- Ukuran ban : 8,25 x 14
- Warna : Army green (hijau ABRI)

Dengan surat keputusan Kementrian Angkatan Darat Nomor: Kep-504/6/1966, tanggal 6 Juni 1966



Mobil Dinas Men/Pangad, 1965.

mobil dinas tersebut dihapus dari kekuatan dan pertanggung jawaban administrasi Angkatan Darat menjadi hak milik keluarga Letjen TNI Ahmad Yani. Pada bulan Mei 1989 atas inisiatif Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI akhirnya mobil ini dipamerkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta.

**MOBIL DINAS
PANGLIMA
KOSTRAD
(PANGKOSTRAD)
MAYOR
JENDERAL TNI
SOEHARTO**

Pada tanggal
1 Oktober 1965
pukul 07.30, Mayor
Jenderal TNI Soeharto
beserta stafnya sudah
berada di markas
Kostrad guna

menganalisa dan mempelajari situasi. Dengan
pedoman perintah Men/Pangad, apabila Men/
Pangad berhalangan maka kedudukan Men/Pangad
digantikan

bawahannya, dan juga telah mendapat saran
dari beberapa perwira tinggi TNI AD.

Atas perintah tersebut, Pangkostrad Mayor Jenderal
TNI Soeharto memutuskan untuk memegang
pimpinan sementara TNI AD.

Dengan menggunakan Jeep Toyota Kanvas
Nomor: 04-62957/44-10, Mayor Jenderal Soeharto
segera bertindak untuk menumpas G.30.S/PKI,
yang didalangi oleh eks. Letkol Untung
dan tokoh PKI yang lain. Mayor Jenderal Soeharto
dari rumahnya di jalan Agus Salim, Jakarta menuju
markas Kostrad menggunakan kendaraan dinas



Mobil Dinas Pangkostrad.

Jeep Toyota Kanvas yang disetir oleh Pratu Soewondo.

Pada 4 Oktober 1965, Mayor Jenderal TNI Soeharto menuju desa Lubang Buaya untuk memimpin langsung jalannya pengangkatan jenazah yang dilaksanakan oleh pasukan KIPAM yang dipimpin oleh Kapten Winanto.

TRUK DODGE

Mobil truk yang digunakan oleh pemberontak G.30.S/PKI untuk membawa jenazah Brigjen TNI D.I.Pandjaitan, yang dipamerkan di lokasi Monumen Pancasila Sakti (pameran taman), adalah mobil truk Dodge tahun 1961 buatan USA dengan nomor polisi B.2982 L. Truk ini merupakan replika kendaraan jemputan P.N. Arta Yasa, yang sekarang divisi cetak uang logam Perusahaan



Umum (Perum) Peruri. Kendaraan tersebut dirampas oleh pemberontak G.30.S/PKI di sekitar jalan Iskandar Syah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 04.00 mobil tersebut berangkat dari kantor/pool kendaraan Perum Peruri. Setelah sampai di jalan Iskandar Syah, Blok M, Kebayoran Baru, dicegat oleh orang-orang berpakaian loreng dan memakai baret banyak diantaranya yang berhenti. Ketika mobil tersebut melewati orang-orang yang berpakaian loreng, supir yang bernama Omon ditodong dengan senjata yang ditembakkan keatas, sehingga pengemudi mobil jemputan P.N. Arta Yasa ketakutan dan memberhentikan mobilnya. Akhirnya mobil tersebut dirampas, digunakan oleh pemberontak untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI D.I. Pandjaitan dari rumahnya di jalan Hasanudin 52, Kebayoran Baru ke desa Lubang Buaya, Pondok Gede.

PANSER SARACEEN

Panser dengan tipe PCMK - 2 Saraceen adalah sebuah kendaraan lapis baja yang berasal dari negara Inggris. Kendaraan tersebut digunakan oleh organik Batalyon Kavaleri 7 Kodam V/Jaya. Pada tanggal 5 Oktober 1965 panser ini digunakan untuk membawa jenazah



Letjen M.T. Harjono dari Markas Besar Angkatan Darat menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada tahun 1976 panser ini dipindahkan ke Batalyon Kavaleri 3 Kodam VIII/ Brawijaya untuk mendukung operasi militer di Timor Timur. Pada bulan Juli 1985, panser ditarik dari penugasan di Timor Timur dan kemudian pada tahun 1987 dipamerkan di halaman Monumen Pancasila Sakti.

TUGU, PATUNG DAN RELIEF

Tugu Pahlawan Revolusi terletak 45 m sebelah utara cungkup sumur maut.

Patung Pahlawan Revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 m, dihiasi patung Garuda Pancasila.

Dinding yang berbentuk trapesium tersebut berdiri di atas landasan yang berukuran 17 x 17 m² dengan tangga yang tingginya 7 anak tangga.

Ketujuh patung Pahlawan Revolusi berdiri berderet dalam setengah lingkaran dari Barat ke Timur yaitu;
patung Brigjen TNI Soetoyo,
Brigjen TNI Pandjaitan,
Mayjen TNI S. Parman,
Letjen TNI Ahmad Yani,
Mayjen TNI Soeprapto,
Mayjen TNI M.T. Harjono,
dan Kapten P. Tendean.

Ketujuh patung berdiri pada alas yang berbentuk lengkung dengan hiasan relief yang melukiskan peristiwa prolog, kejadian dan penumpasan G.30./S/PKI oleh ABRI dan rakyat.



Tugu, Patung dan relief Monumen Pancasila Sakti

CITA-CITA PERJUANGAN KAMI
UNTUK MENEGAKKAN
KEMURNIAN PANCASILA
TIDAK MUNGKIN DIPATAHKAN
HANYA DENGAN MENGUBUR KAMI
DALAM SUMUR INI

LUBANG BUAYA, 1 OKTOBER 1965

